

**IMPLEMENTASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DI DPR RI STUDI
KASUS: PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

Oleh

**Nama: Sari Yuliati
NIM: 2040057010**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**IMPLEMENTASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DI DPR RI STUDI
KASUS: PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

**Nama: Sari Yulianti
NIM: 2040057010**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia :

1. Rendah Hati (*Humility*) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (*Sharing and Caring*) | Ibrani 10:24
3. Profesional (*Professional*) | Matius 25:21
4. Disiplin (*Discipline*) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (*Responsibility*) | Matius 25:23
6. Berintegritas (*Integrity*) | Amsal 19:1



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Yulianti
NIM : 2040057010
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“IMPLEMENTASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DI DPR RI STUDI KASUS: PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 04 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Sari Yulianti
NIM: 2040057010



PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR
RI Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
KUHP**

Oleh:

Nama	: Sari Yulianti
NIM	: 2040057010
Program Studi	: Hukum
Peminatan	: Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 4 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.
NIDK : 8999101024

Pembimbing II

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIDN : 0325028101

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0327046303

Dekan

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN : 0302117804



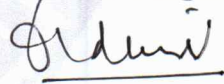
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 4 Juli 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sari Yuliati
NIM : 2040057010
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR RI Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H	Ketua	
2. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H	Anggota	
3. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H	Anggota	



HALAMAN PENGESAHAN

**Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR RI
Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Sari Yuliaty
NIM : 2040057010
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada tanggal 4 Juli 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama,

I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping,

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H

Anggota Penguji,

Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H



PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Yuliati
NIM : 2040057010
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

“Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR RI Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Jakarta, 04 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Sari Yuliati
NIM: 2040057010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa untuk segala berkat dan rahmat-Nya dalam menuntun penulis selama melakukan skripsi ini yang berjudul **Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR RI Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP**, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat administrasi menyelesaikan pendidikan tinggi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Tujuan disusunnya skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Utama penulis, telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta memotivasi penulis.
4. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing kedua penulis dan sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Para Dosen pengampu selama perkuliahan di kelas karyawan Fakultas Hukum UKI, yang telah membimbing penulis untuk lebih giat dalam pengerjaan skripsi ini kepada penulis serta memberikan dorongan kepada penulis supaya dapat menjadi mahasiswa berprestasi.
7. Keluarga dan tim yang telah memberikan penulis dorongan dan selalu mendoakan penulis untuk selalu berjuang dalam menempuh Pendidikan.
8. Teman Angkatan penulis yang memberikan penulis motivasi dalam penulisan skripsi ini, serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan rendah hati.

Jakarta, 4 Juli 2025



Sari Yuliati
NIM: 2040057010



DAFTAR ISI

Cover	i
Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing	iv
Persetujuan Tim Penguji Skripsi	v
Halaman Pengesahan	vi
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Skripsi	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Abstrak	xii
Abstract	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	6
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Teori Legislasi	22
B. Teori Partisipasi Publik	25
C. Prosedur, Tata Cara, dan Tahap dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia	29
D. Sejarah dan Perkembangan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia	37

BAB III BENTUK PENGATURAN TERKAIT PENERAPAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG	39
A. Konsep Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia Saat Ini	39
B. Aturan Hukum Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang di Indonesia	44
C. Prosedur, Tata Cara dan Tahap Implementasi Partisipasi Publik Yang Bermakna dalam Penyusunan Undang-Undang	53
BAB IV IMPLEMENTASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP	64
A. Implementasi Partisipasi Publik yang Bermakna di DPR dalam Penyusunan Undang- Undang	64
B. Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	66
C. Tahapan Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	78
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

A Nama	: Sari Yulianti
B NIM	: 2040057010
C Bagian	: Hukum Tata Negara
D Judul	: Implementasi Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Undang-Undang Di DPR RI Studi Kasus: Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
E Halaman	: xiv92 halaman + daftar pustaka
F Kata Kunci	: Partisipasi Publik, Rancangan Undang- Undang, Penyusunan

G Ringkasan Isi : DPR RI memiliki kewenangan meliputi tiga fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Produk hukum atau undang-undang yang disusun tentu melalui proses pembentukan dengan adanya partisipasi yang bermakna oleh publik, hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (UU PPP). Dalam Menyusun UU KUHP, DPR RI tentu berpegang teguh pada UU PPP tersebut sebagai pedoman. Melalui penelitian ini, mencoba untuk menganalisis proses penyusunan dan pembentukan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan acuan UU PPP.

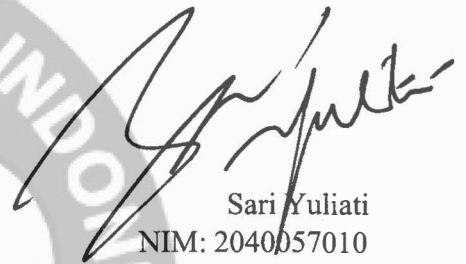
Teori dalam penelitian ini menggunakan teori legislasi untuk melihat serangkaian proses dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, teori legislasi tersebut juga coba dilengkapi dengan teori partisipasi publik untuk melihat lebih dalam bagaimana keterlibatan publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengkaji partisipasi publik yang bermakna dalam penyusunan atau pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Temuan daripada penelitian ini, meskipun serangkaian proses telah dilakukan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, akan tetapi masih terdapat perdebatan di masyarakat yang tak luput dari kritik sebagaimana bentuk dari partisipasi publik. Penelitian ini kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk seharusnya tidak membatasi keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Hal ini dikarenakan Undang-undang Dasar, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menjamin hak masyarakat dalam berpartisipasi. Pemerintah perlu membuka lebar seluas-luasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari hak yang dijamin oleh UU PPP No. 13 Tahun 2022.

- H Daftar Acuan : 21 buku + 17 jurnal/artikel ilmiah + 4
website + 5 peraturan perundang-
undangan
- I Dosen Pembimbing I : I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 4 Juli 2025

Penulis,



Sari Yuliati

NIM: 2040057010



Abstract

- A. *Name* : Sari Yulianti
- B. *NIM* : 2040057010
- C. *Specialty Program/Department* : Constitutional Law
- D. *Title* : *Implementation of Public Participation in Drafting Laws in the Indonesian House of Representatives Case Study: Drafting of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Code*
- E. *Pages* : xiv92 pages+bibliography
- F. *Keywords* : Public Participation, Law Draft, Drafting
- G. *Summary* :

The Indonesian House of Representatives has the authority to cover three functions, namely the budget function, the supervisory function and the legislative function. The legal products or laws that are drafted certainly go through a process of formation with meaningful participation by the public, this is as regulated in Law Number 12 of 2011 as amended by Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation (UU PPP). In drafting the Criminal Code Law, the Indonesian House of Representatives certainly adheres to the PPP Law as a guideline. Through this study, we try to analyze the process of drafting and forming Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code with reference to the PPP Law.

The theory in this study uses the theory of legislation to see a series of processes in the creation of legislation. In addition, the theory of legislation is also complemented by the theory of public participation to see more deeply how the public is involved in the formation of legislation. This study uses the statute approach and conceptual approach methods. The scope of this research is to examine meaningful public participation in the drafting or formation of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code.

The findings of this study, although a series of processes have been carried out in the preparation of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, there is still debate in society that is not free from criticism as a form of public participation. This study then provides recommendations to the government that it should not limit public involvement in the formation of laws. This is because the Constitution, and Law Number 13 of 2022 concerning the second amendment to Law Number 12 of 2011 have guaranteed the right of the community to participate. The government needs to open up as widely as possible public involvement in the process of forming laws. In this case, public involvement is part of the rights guaranteed by Law Number 13 of 2022 on PPP.

- H. *References* : 21 books + 17 journals
- I. *Supervisor I* : I Dewa Ayu Widayani, S.H., M.H.
- Supervisor II* : Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Jakarta, 4 July 2025

Writer,

Sari Yulianti

NIM: 2040057010

